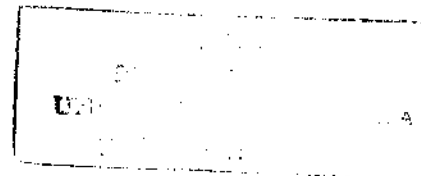


SKRIPSI

AGUNG PRASETYO GURITNO, ST.

PERJANJIAN KREDIT EKSPOR KAITANNYA DENGAN LETTER OF CREDIT

KK
No 2424/2018
Agung
P



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1998

**PERJANJIAN KREDIT EKSPOR
KAITANNYA DENGAN LETTER OF CREDIT**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Pembimbing,



Sri Handajani, S.H., M.Hum.

NIP. 130 809 069

Penyusun,



Agung Prasetyo Guritno, ST.

NIM. 039413880

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
1998**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a. Perjanjian kredit ekspor sebenarnya merupakan suatu penetapan struktur kredit yang merefleksikan hak dan kewajiban debitor dan kreditor secara seimbang. Penetapan struktur dalam suatu bentuk perjanjian yang secara garis besar mempunyai tujuan untuk memberikan fasilitas kredit kepada debitor. Penetapan struktur perjanjian kredit ekspor beserta perjanjian jaminan kredit ekspor mempunyai karakteristik bahwa dalam bagiannya menempatkan sarana dokumen letter of credit sebagai syarat bahkan diikat dalam suatu lembaga jaminan berupa *cessie*. Ternyata sarana ini terkesan tumpang tindih dalam fungsi pelaksanaan perjanjian kredit ekspor, sehingga menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum para pihak pada perjanjian kredit ekspor. Ketidakjelasan hubungan hukum ini tercermin dari keterlibatan pihak ketiga (importir) pada hubungan utang piutang dan pengalihannya, sehingga pula kedudukan pihak sebenarnya dalam perjanjian obligatoir dan *accessoir*nya menjadi kabur.
- b. Perlindungan hukum bagi perbankan dengan memperhatikan karakteristik yang ada yaitu melalui persyaratan penyerahan irrevocable export letter of credit, pernyataan surat sanggup ataupun surat akseptasi dengan lembaga jaminan berupa *cessie* atas tagihan letter of credit, tidaklah mengakomodasikan

perlindungan hukum secara keseluruhan. Penyerahan irrevocable export letter of credit yang mempunyai sifat performace guarantee merupakan sarana penilaian perbankan dalam hal pemberian kredit ekspor pada nasabah sekaligus eksportir, karena sifat dari irrevocable export letter of credit yang merupakan jaminan atas pelaksanaan pengiriman barang. Begitu pula dalam hal pernyataan surat sanggup maupun surat aksep serta pengalihan tagihan letter of credit tidaklah memberikan kontribusi perlindungan hukum sepenuhnya terhadap perbankan, karena masih digantungkan terhadap pelaksanaan pengiriman barang oleh eksportir. Perlindungan ini semua secara kumulatif merupakan persyaratan bersama-sama dengan lembaga jaminan diupayakan memberikan perlindungan hukum secara maksimal.

4.2. Saran

- a. Seyogyanya penetapan struktur perjanjian mengatur secara jelas antara fungsi penyerahan irrevocable export letter of credit dengan bersifat tranferable, pernyataan surat aksep maupun surat sanggup sebagai surat berharga tanpa persyaratan untuk membayar suatu jumlah tertentu serta meletakkan wesel ataupun surat sanggup dari importir secara jelas pada lembaga jaminan berupa cessie atas tagihan letter of credit, supaya tidak terjadi kerancuan dalam hubungan hukum para pihak dalam perjanjian ini.
- b. Sebaiknya dalam meletakkan lembaga jaminan berupa cessie atas tagihan letter of credit dilakukan sebagai lembaga jaminan tambahan, mengingat realisasi

eksekusinya dalam praktek terbentur dengan karakter letter of credit. Sehingga seyogyanya diperlukan suatu lembaga jaminan utama selain lembaga jaminan berupa cession yang mudah dieksekusi, seperti hak tanggungan, gadai bahkan fiducia atas barang-barang eksportir.